

Pengaruh keperilakuan organisasi dan implementasi sistem akuntansi terhadap keuangan daerah (studi pada pemerintah Desa Tlekung Kota Batu)

Maria Savira; Ahmad Mukofi*; Sri Andika

Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

**E-mail korespondensi: unitriahmadmukoffi@gmail.com*

Abstract

This study aims to determine the effect of organizational behavior and accounting system implementation on regional finances. The research was conducted on 30 respondents who have authority in the financial sector in the Tlekung Village Government, Batu City. The data used are primary data, which is obtained through distributing research questionnaires. In this study the research variables were grouped into two categories. The first is the independent variable consisting of organizational behavior and the implementation of the accounting system. The second is the dependent variable, namely regional financial accounting. To test the hypothesis, the quantitative data analysis method is used. Hypothesis testing tools used in the process of testing the hypothesis are multiple linear regression models, f-statistical tests and t-statistical tests. Based on the results of testing the first hypothesis, it was found that organizational behavior has a significant effect on the utility of regional finance in Tlekung Village, Batu City. The results of testing the second hypothesis indicate that the implementation of the accounting system has a significant effect on the usefulness of regional financial accounting in Tlekung Village, Batu City.

Keywords: Behavioral, Organizational, Accounting systems, Regional finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku organisasi dan penerapan sistem akuntansi terhadap keuangan daerah. Penelitian dilakukan terhadap 30 responden yang memiliki kewenangan dibidang keuangan pada pemerintah Desa Tlekung kota Batu. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini variabel penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama adalah variabel bebas yang terdiri dari perilaku organik dan penerapan batang akuntansi. Kedua, variabel dependen yaitu akuntansi keuangan daerah. Untuk menguji hipotesis digunakan metode analisis data kuantitatif. Alat pengujian hipotesis yang digunakan dalam proses pengujian hipotesis adalah model regresi linier berganda. Uji statistik dan uji statistik berdasarkan pengujian hipotesis pertama. Ditemukan bahwa perilaku organisasi berpengaruh signifikan terhadap utilitas keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pelayanan akuntansi keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu.

Kata kunci: Keperilakuan, Organisasi, Sistem akuntansi, Keuangan daerah

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan sektor publik tentang laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk mencapai good governance. Pemerintah mempublikasikan laporan keuangan bertujuan sebagai dasar untuk pengambilan

keputusan bagi para pengguna kebutuhan informasi laporan keuangan tersebut untuk masyarakat, pemerintah, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) tentang pemerintahan daerah.

Sari & Ratna, (2014) pengelolaan keuangan daerah yang baik, Sekretariat Daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang gagal dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis, dan amanah, Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum (Adhitama, 2017).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan instruksi Keputusan Presiden (2016) tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berada di setiap kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun (2007) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Nomor (2013).

Duha & Timotius, (2016) menjelaskan terkait dengan perilaku organisasi yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang andal dalam penerapan implementasi (SAKD) merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDPermendagri No.59, Tahun (2007) dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan. Implementasi sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumentasi sampai dengan laporan dihasilkan Loughnan et al., (2010) dan Menurut beberapa penelitian lainnya seperti penelitian Sofyani et al., (2013), yang

mengatakan bahwa implementasi sistem akuntansi daerah bertujuan untuk mempermudah menyajikan laporan keuangan secara cepat dan akurat, selain itu banyak peneliti yang mengemukakan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah juga sangat bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan di setiap daerah seperti yang dikemukakan oleh Mulyono, 2016; Oktavia et al., 2016; Yuliasari, (2014).

Didalam hal implementasi faktor Perilaku organisasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan Menurut penelitian Aziz, 2019; Eristanti et al., (2016); Khaulia et al., (2019); Mranani & Lestiorini, (2011), yang mengemukakan bahwa faktor keprilakuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Faktor keprilakuan organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek-aspek tersebut yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi Khaulia et al., (2019). Perilaku organisasi juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kayati, (2016).

Sistem informasi juga digunakan di dalam akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengolah aktivitas data transaksi perusahaan yang digunakan untuk membantu proses transaksi keseharian, buku besar/pelaporan keuangan dan laporan laba/rugi. Sistem akuntansi yang mana telah diatur dalam peraturan menteri keuangan No59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendagri No21, (2011) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri No13, (2006) tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sedangkan pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasiannya yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi Bodnar dan Hopwood, dalam Lyna Latifah Arifin Sabeni, (2007).

LANDASAN TEORI

Pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Subosukawonos Raten

Menurut Janitra, (2015) konflik kognitif tidak berhubungan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Konflik afektif berhubungan negatif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah (survei pada pemerintah daerah di Jawa Tengah)

Menurut Nurlaela dan Rahmawati, (2010) Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa.

Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kegunaan sistem keuangan daerah

Menurut kayati,(2016) Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Subosuka wonosraten. Menurut Mahendra,(2016) Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan, konflik kognitif tidak berhubungan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, konflik afektif berhubungan negatif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, hanya dukungan atasan yang berpengaruh positif untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

METODE

Fokus penelitian ini hanya dilakukan Pemerintah Desa Tlekung Kota Batu terkait dengan pengaruh faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti (Notoadmojo 2013), populasi pada penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintah Desa Tlekung Kota Batu yang mana memahami serta mengelola akan keuangan daerah, jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Sampel yang digunakan adalah Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono 2013). Alasan mengambil total sampling karena menurut jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 30 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi serta interview. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah Regresi Linier berganda dan koefisien determinasi (Agussalim, 2015). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan toleransi error 5 persen. Sebelum proses analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian (kuesioner dengan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik).

Definisi operasional

Variabel keperilakuan organisasi X1

Perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia yang bekerja di organisasi. dengan demikian, ruang lingkup perilaku organisasi pada dasarnya adalah integrasi dari 3 konsep atau studi perilaku yang masing-masingnya adalah : perilaku individu, perilaku Antar-Individu, dan perilaku Kelompok.

Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan 3 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

Variabel implementasi sistem akuntansi X2

Sebagai sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya CBIS (Computer Based Information System) Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan sistem

informasi akuntansi dalam sebuah organisasi antara lain adalah sebagai berikut :pelatihan dan keahlian

Untuk Mengukur kejelasan tujuan maka digunakan 2 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

Variabel keuangan daerah (Y)

Variabel dependen adalah keuangan daerah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggung jawaban. Indikator dalam variabel ini ialah: transparansi, efisien, akuntabilitas, dan partisipatif

Untuk Mengukur kejelasan tujuan maka digunakan 4 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis validitas dan reliabilitas

Sebelum instrument kuesioner diberikan kepada responden terlebih dahulu di uji validitas dan reliability. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Instrumen dikatakan valid jika nilai signifikansi dari skor butir instrumen (Sig 2 tailed) $< 0,05$ (5%). Berdasarkan proses pengolahan data dapat diperoleh hasil uji validitas dari masing-masing variabel independen (keperilakuan organisasi dan implementasi sistem akuntansi) dan variabel dependen (keuangan daerah) seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pengujian validitas

Keterangan	Sig	Alpa	Kesimpulan
Keperilakuan organisasi	0,000	0,05	Valid
Implementasi Sistem akuntansi	0,000	0,05	Valid
Keuangan daerah	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari semua variabel independen (keperilakuan organisasi dan implementasi sistem akuntansi) dan variabel dependen (keuangan daerah) mempunyai nilai signifikansi 0.000 dimana Sig 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner pada semua variable dinyatakan valid.

Menurut Ghozali (2011:47) dalam Kayati (2016), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan program SPSS Statistik 16 dengan analisis uji statistik Cronbach Alpha (α). Apabila nilai (α) lebih besar dari 0,07 dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel (Ghozali, 2011 dalam Kayati, 2016). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pengujian reliabilitas

Keterangan	Cronbach Alpha	Nilai Batas	Kesimpulan
Keperilakuan organisasi	0,839	0,07	Realibel
Implementasi Sistem akuntansi	0,827	0,07	Realibel
Keuangan daerah	0,767	0,07	Realibel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat kita lihat bahwa seluruh variabel dependent dan variabel independent memiliki nilai cronbach alpha > 0.07 , sehingga untuk seluruh variabel tersebut reliable dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Selain itu penelitian ini juga sudah dilakukan uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

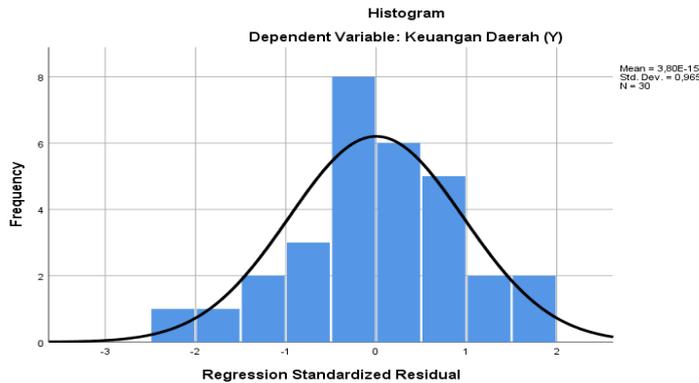
Tabel 3. One-sample kolmogorov-smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85092042
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,068
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d

Sumber: Data diolah, 2021

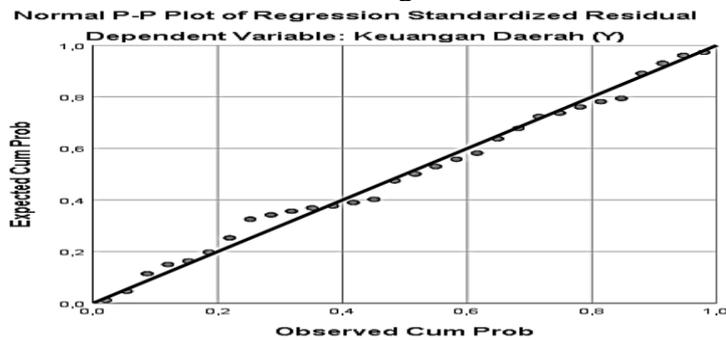
Pada Tabel 3 menyimpulkan bahwa hasil uji normalitas metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test sehingga dapat menyimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal di karenakan nilai signifikan di atas 0,05. ($0,200 > 0,05$).



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 1. Hasil uji normalitas dengan koefisien kurtosis

Hasil uji koefisien kurtosis menunjukkan bahwa kuerve tersebut tidak terlalu runcing (tinggi) atau tidak pula terlalu datar (rendah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pendapatan pengrajin genteng berdistribusi normal karena memiliki koefisien kurtosis dengan kurve normal.



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 2. Uji asumsi normalitas

Pada Gambar 2. dapat disimpulkan bahwa penyebaran data (titik) disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik. Hal ini menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal dan memenuhi pada asumsi normalotis.

Uji asumsi multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil uji multikolinieritas

Variabel bebas	collinearity Statitics		
	Tolerance	VIF	
Keperilakuan Organisasi	0,839	0,07	Realibel
Implementasi Sistem Akluntansi	0,827	0,07	Realibel

Sumber: Data diolah, 2021

Berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas: tolerance untuk keperilakuan organisasi adalah 0,737. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $< 0,1$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas: VIF untuk keperilakuan organisasi adalah 1,357. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $< 0,1$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas: VIF untuk keperilakuan organisasi adalah 1,357. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

Uji asumsi heteroskedastisitas

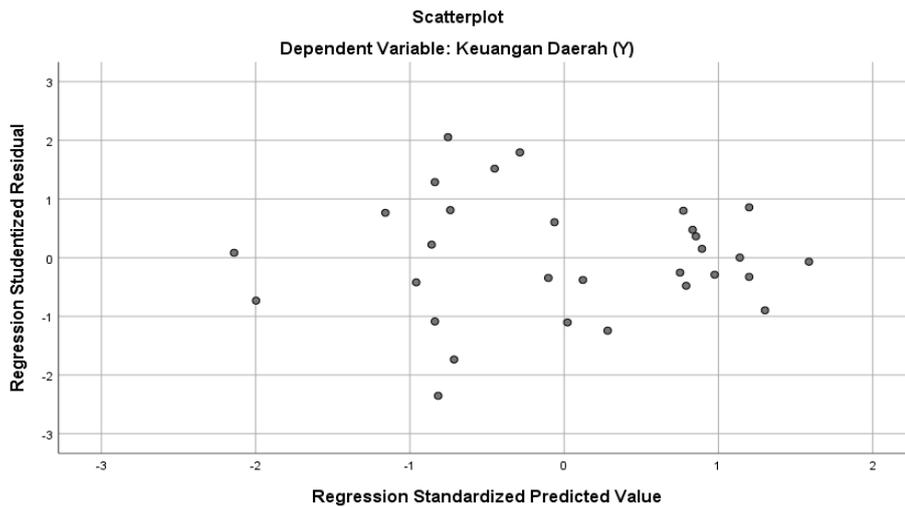
Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dan nilai absolut residualnya dengan kriteria sebagai berikut: 1).Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 2).Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,358	,395		3,438	,002
Keperilakuan Organisasi (X1)	-,009	,021	-,088	-,419	,679
Implementasi Sistem Akuntansi (X2)	-,030	,023	-,283	-1,343	,191

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat di ketahui bahwa setiap variabel independen bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai signifikansi setiap variabel independen dengan nilai absolut residualnya dan menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen lebih besar dari nilai absolut residualnya (0,05). Berikut ini uji asumsi heroskedastisitas pada masing-masing variabel :



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 3. Uji asumsi heteroskedastisitas

Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang membentuk pola yang jelas (titik-titik menyebar di atas dan di bawa angka 0 pada sumbu Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji asumsi autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW). 1). $DU < DW$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi, 2). $DW > DL$ atau $DW < 4 - DU$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

Nilai DL dan DU sebesar tabel statistik Durbin-Watson atau DW dengan $n = 30$ dan $k = 1$ dapat dari nilai $DL = 1.2837$ dan $DU = 1.5666$. Jadi $2 - DL = 1.2837$ dan $4 - DU = 1.0706$. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983a	,967	,964	,88187	2,057

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 2,057, karena nilai DW terletak di antara nilai $DW < DL$ ($1.2837 < 1.5666 < 1.2837$) hasilnya ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam regresi ini.

Hasil penelitian

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda dimana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,676	,677		-,999	,327
Keperilakuan Organisasi	,376	,036	,430	10,537	,000
Implementasi Sistem	,654	,039	,691	16,918	,000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari coefficientsa di atas dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,367 + 0,654$$

β_1 =merupakan variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keuangan daerah (Y) yang nilainya akan diprediksi oleh variabel adalah berperilaku organisasi (X1) dan implemensati sistem akuntansi(X2) terhadap keuangan daerah (Y).

β_1 =koefisien regresi variabel berperilaku organisasi (X1) sebesar 0,367 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap keuangan daerah (Y). Pada variabel berperilaku organisasi (X1) ini mempunyai thitung10,537 < ttabel 2.051 dan Sig 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan berperilaku organisasi (X1) terhadap keuangan daerah (Y) di Desa Tlekung Kota Batu.

β_2 =koefisien regresi variabel implemensati sistem akuntansi(X2) sebesar 0,654 memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap keuangan daerah (Y). Pada variabel implemensati sistem akuntansi(X2) ini mempunyai thitung16,918 < ttabel 2.051 dan Sig 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan implemensati sistem akuntansi(X2) terhadap keuangan daerah (Y) di Desa Tlekung Kota Batu.

Koefisien determinasi

Koefisien Determinasi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variabel bebas memberikan peranan pada variabel terikatnya.Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R2). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan oleh berperilaku organisasi (X1) dan implemensati sistem akuntansi(X2) terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu (Y) sehingga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Ringkasan hasil analisis regresi berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,983a	0,967	0,964	0,88187	2,057

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan analisis data pada tabel di atas dan menunjukkan bahwa nilai koefisien adjusted r square adalah sebesar 0,967. Hal ini berarti 96,7% variabel euangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu (Y)dapat dijelaskan oleh variable berperilaku organisasi (X1) dan implemensati sistem akuntansi(X2). Sedangkan sisanya 33 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model (Ghozali, 2011).

Pengujian hipotesis

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$. Pengujian model regresi secara parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil analisis uji (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,676	,677		-,999	0,327
Keperilakuan Organisasi	,376	,036	,430	10,537	,000
Implementasi Sistem Akuntansi	,654	,039	,691	16,918	,000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) dapat diketahui bahwa: Untuk variabel keperilakuan organisasi, dapat disimpulkan bahwa thitung adalah 10,537, sedangkan ttabel adalah 2.051, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,972 < 2.051$), maka keperilakuan organisasi secara parsial dapat memberikan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata keperilakuan organisasi berpengaruh terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hal ini berarti hipotesis H1 diterima.

Untuk variabel implementasi sistem akuntansi, dapat disimpulkan bahwa thitung adalah 16,918, sedangkan ttabel adalah 2.051, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($16,918 > 2.051$), maka implementasi sistem akuntansi secara parsial dapat memberikan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hal ini berarti hipotesis H2 diterima.

Uji kelayakan model (uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2011). Apabila analisis menggunakan uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Uji kelayakan model (uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	612,369	2	306,184	393,705	,000b
Residual	20,998	27	,778		
Total	633,367	29			

a. Dependent variable: keuangan daerah (Y)

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Uji F pada tabel di atas, nilai F hitung 393,705 dengan signifikansi yang menunjukkan 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu dipengaruhi oleh keperilakuan organisasi dan implemensati sistem akuntansi (Ghozali, 2011).

Pengaruh keperilakuan organisasi terhadap keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keperilakuan organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,367 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat ada pengaruh signifikan dan positif keperilakuan organisasi terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2017) dan menyatakan budaya organisasi atau dikenal dengan sebuah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang tinggi akan membuat pegawai (individu) akan senantiasa mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi yang dianggap sebagai sebuah keharusan. Dengan demikian komitmen organisasi akan membentuk perilaku individu yang senantiasa patuh terhadap peraturan-peraturan organisasi sehingga akan menghasilkan keandalan pelaporan keuangan yang baik. Disamping itu juga penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pranasari, 2020) dan menyatakan bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan dalam mengelola keuangan daerah. Dalam hal ini, sebagian pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah menerapkan budaya organisasi yang umum dilakukan oleh setiap instansi seperti masuk kerja dengan tepat waktu, menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku karena merupakan kewajiban pribadi para pegawai masing-masing.

Pengaruh implemensati sistem akuntansi terhadap keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implemensati sistem akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,654 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat ada pengaruh signifikan dan positif implemensati sistem akuntansi terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota Batu. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2018) dan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya pemanfaatan teknologi dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memperlancar pada proses implementasi sistem keuangan yang dilakukan oleh aparat desa, dengan kelancaran proses implementasi sistem keuangan tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan. Penelitian ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Handayani, 2017) dan menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika implementasi akuntansi berbasis akrual semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan keuangan keuangan daerah yang dihasilkan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai yang diharapkan memerlukan

peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Keperilakuan organisasi dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota. Artinya bahwa keperilakuan organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan yang ada pada Desa Tlekung Kota.

Saran

Implementasi sistem akuntansi dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah di Desa Tlekung Kota. Artinya bahwa implementasi sistem akuntansi dapat memperkuat pengaruh sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan yang ada pada Desa Tlekung Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S. (2017). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (sap), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). *World Agriculture*.
- Junery, M. F., & Aziz, A. (2018). Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(2), 288-296.
- Duha, & Timotius. (2016). Perilaku organisasi.
- Janitra. (2015). Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (studi kasus di Dppkad Subo suka wonosraten).
- Kayati. (2016). *Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah*. Skripsi Tidak Dipublikasi.
- Keputusan Presiden. (2016).
- Khaulia, A. T., Cahyono, D., & Pramono, D. E. (2019). Pengaruh faktor keprilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *international Journal of Social Science and Business*, 3(4), 524. <https://doi.org/10.23887/Ijssb.V3i4.21667>
- Loughnan, S., Haslam, N., & Bastian, B. (2010). The role of meat consumption in the denial of moral status and mind to meat animals. *Appetite*. 55(1):156-9. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.05.043>
- Lyna Latifah Arifin Sabeni. (2007). Faktor keprilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. SNA.
- Mahendra, R. (2016). Pengaruh dukungan atasan, pelatihan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kegunaan sistem akuntansi daerah. *Akuntansi*.
- Mranani, M., & Lestiorini, B. (2011). Faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai intervening. *Fokus Ekonomi*, 10(3), 193–203.
- Mulyono, F. E. P. (2016). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan

- penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Journal of Experimental Psychology: General*.
- Nurlaela, S., & Rahmawati. (2010). Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Subosukawonosraten. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Sari, & Ratna, E. A. (2014). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik serta pengetahuan dewan terhadap anggaran dalam penyusunan APBD (Studi Empiris Pada DPRD Se-Eks Karesidenan Pati). Naskah Publikasi.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan faktor *internal institusi dan imple-mentasi sistem akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (SAKIP)* di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Indonesia* 10, 2, 184–205.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. (N.D.). Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.